

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemuda merupakan generasi penerus yang diharapkan menjadi tonggak kemajuan dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Sejarah membuktikan bahwasannya pemuda merupakan elemen yang berperan besar dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga maju mundurnya suatu negara ditentukan oleh pemikiran dan kontribusi para pemuda. Sejatinya dalam konteks kehidupan bermasyarakat generasi muda menjadi motor penggerak perjuangan yang termaifestasi dengan berusaha merubah kondisi bangsa ke arah yang lebih baik, bahkan pemuda dikategorikan sebagai “*agent of social change*” yang memiliki idealisme, mengedepankan kreativitas dan inovasi dalam pembangunan nasional (Kurnia, 2021).

Begitu pun dalam kancah nasional, pemuda memainkan posisi sentral khususnya dalam upaya membangun bangsa. Dinamika yang ada menggambarkan bahwa kontribusi generasi muda sangat besar dalam proses pembangunan, hal ini terbukti sejak era pergerakan nasional hingga era reformasi, generasi muda menjadi motor penggerak perubahan, sekaligus memastikan bahwa proses perubahan tersebut sesuai dengan tuntutan jaman, dalam konteks pembaruan dan pembangunan bangsa.

Selaras dengan kondisi di atas, dikemukakan oleh Abdullah (1974) bahwa terdapat beberapa karakteristik yang dimiliki pemuda yang menonjol diantaranya, yaitu kemurnian idealismenya, keberanian dan keterbukaannya dalam menyerap

nilai-nilai dan gagasan-gagasan baru, di samping besarnya semangat pengabdian, spontanitas dan pengabdian, Inovasi dan kreativitasnya, keinginan untuk segera mewujudkan gagasan-gagasan baru, keteguhan janjinya dan keinginan untuk menampilkan sikap dan kepribadiannya yang mandiri, masih langkanya pengalaman-pengalaman yang dapat merelevansikan pendapat, sikap, dan tindakannya dengan kenyataan yang ada. Berdasarkan beberapa karakteristik sebagai sebuah potensi menjadikan pemuda sebagai aset bangsa yang perlu mendapat perhatian.

Besarnya potensi pemuda tersebut sejatinya perlu diarahkan dan dikembangkan guna menuju generasi yang berdaya saing, terlebih di era globalisasi saat ini. Di lain sisi, terdapat konsekuensi pembiaran terhadap pemuda bisa menjadi ancaman bagi kemajuan bangsa, akan tetapi pemanfaatan potensinya justru dapat mendorong kemajuan diberbagai segi kehidupan. Dengan demikian, pemuda akan senantiasa menempati posisi penting dan strategis, sebagai pelaku pembangunan maupun sebagai generasi penerus untuk berkiprah di masa depan.

Sejalan dengan itu, meninjau definisinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pembangunan Kepemudaan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, Dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda, serta melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan menjelaskan bahwa ‘pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun’. Selain itu ditegaskan pada Pasal 16 bahwa “pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan”.

Berkorelasi dengan ihwal tersebut, realitas aktual menunjukkan bahwa penduduk Indonesia dalam kategori usia muda berada pada porsi yang cukup besar. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa jumlah penduduk Indonesia mencapai 273,87 juta jiwa pada 31 Desember 2021. Di mana komposisi penduduk berusia 20-24 tahun sebesar 22,98 juta jiwa, kemudian sebanyak 21,75

juta penduduk berusia 25-29 tahun. Sebanyak 20,82 juta penduduk Indonesia berusia 30-34 tahun, sedangkan sebanyak 21,98 juta penduduk berusia 35-39 tahun, lebih lanjut bahwa sebanyak 20,69 juta penduduk berusia 40-44 tahun. Selanjutnya komposisi penduduk berusia 45-49 tahun sebesar 18,71 juta jiwa, dan 16,21 juta penduduk Indonesia berusia 50-54 tahun, serta penduduk berusia 55-59 tahun sebesar 13,22 juta jiwa. Sementara itu, penduduk lanjut usia di atas 60 tahun mencapai 26,66 juta jiwa (Dirjen Dikcapil, 2021). Untuk memberikan kejelasan dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1 Komposisi Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Juta Jiwa
1	20-24	22,98
2	25-29	21,75
3	30-34	20,82
4	35-39	21,89
5	40-44	20,69
6	45-49	18,71
7	50-54	16,21
8	55-59	13,22
	+60	26,66

Sumber: Dirjen Dikcapil, 2021.

Berdasarkan data di atas, tidak dapat dipungkiri dibutuhkan dibutuhkan keterlibatan semua pihak dalam pembangunan kepemudaan. Apabila dilihat dari segi eksistensinya pemuda dapat dianalogikan seperti pisau bermata dua. Pasalnya satu sisi keberadaan pemuda dibutuhkan untuk melanjutkan pembangunan bangsa dan negara, akan tetapi di sisi lainnya, tidak jarang keberadaan pemuda melahirkan dampak negatif. Berdasarkan realitas dinamika kepemudaan saat ini tidak jarang sumber kriminalitas dan kejahatan sosial justru banyak dilakukan mereka yang tergolong sebagai kaum muda. Faktanya tidak sedikit pemuda yang terjerumus pada masalah-masalah sosial seperti kriminalitas, tawuran, premanisme, narkoba, psikotropika, adiktif (NAPA), dan HIV/AIDS serta pembegalan/perampokan kendaraan dan pembunuhan. Di samping rendahnya kepedulian pemuda terhadap berbagai permasalahan masyarakat (bangsa) juga telah menjadikan sebagian pemuda menjadi kalangan yang apatis, acuh, dan egois. Selain itu, menjamurnya

budaya permisif, budaya hedonis, dan budaya kebarat-baratan telah melunturkan semangat kepribadian nasional dan nilai-nilai luhur bangsa (Kemenpora, 2009).

Tidak dapat dipungkiri realitas aktual generasi muda saat ini memiliki banyak tantangan diantaranya masih kurangnya partisipasi angkatan kerja pemuda, masih kurangnya kemampuan kewirausahaan, belum serasinya kebijakan kepemudaan di tingkat nasional maupun daerah, tingginya tingkat pengangguran terbuka pemuda di samping maraknya masalah-masalah sosial lainnya di kalangan pemuda, pasalnya generasi muda atau kalangan remaja menjadi salah satu sumber kriminalitas yang marak saat ini. Kondisi tersebut terlihat dari hasil Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) penduduk usia muda mencapai 18,03% pada Februari 2021. TPT tersebut menunjukkan, dari 100 orang angkatan kerja usia muda terdapat 18 orang yang menganggur. Hal tersebut dapat dilihat dirinci pada tabel, sebagai berikut:

Tabel. 1.2

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Usia Muda Tahun 2021

No	Jenis	TPT Usia Muda (Juta)	TPT Nasional (Juta)	Total Angkatan Kerja (Juta)
1	Usia 15 – 24	3,82	8,75	21,20
2	Presentase	43,7 %	6,28 %	

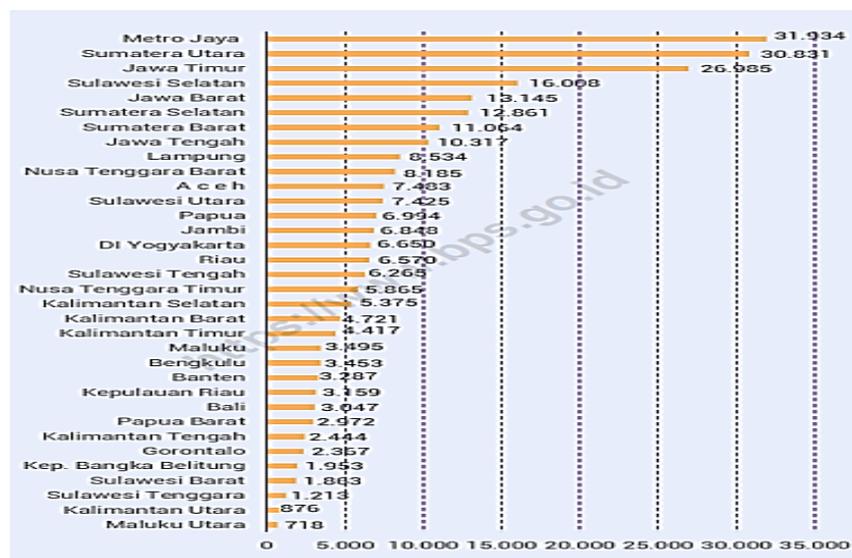
Sumber: Sakernas, 2021.

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, dapat dijelaskan bahwa total angkatan kerja usia 15-24 tahun mencapai 21,20 juta. Artinya terdapat 3,82 juta penduduk di rentang usia tersebut yang sedang tidak bekerja. Jumlah tersebut hampir setengah dari total TPT nasional yang mencapai 8,75 juta atau sebesar 6,26% pada Februari 2021. Jika dipersentasekan maka TPT usia muda mencapai 43,7% dari total TPT nasional (Monavia, 2021).

Berkorelasi antara besarnya angka pengangguran dengan tindak kriminalitas di tengah masyarakat. Berdasarkan data yang dirilis Biro Pengendalian Operasi Mabes Polri dalam Statistik Kriminal tahun 2020 berkaitan dengan statistik kriminalitas, bahwa berdasarkan aspek jumlah kejahatan untuk level provinsi/polda selama tahun 2019, tercatat Polda Metro Jaya mencatat jumlah kejahatan terbanyak (31.934 kejadian), disusul oleh Polda Sumatera Utara (30.831 kejadian), dan Polda

Jawa Timur (26.985 kejadian). Sementara itu, Polda Sulawesi Tenggara, Kalimantan Utara, dan Maluku Utara, merupakan tiga wilayah dengan jumlah kejahatan paling sedikit, yaitu berturut-turut sebanyak 1.213; 876; dan 718 (BPS, 2020). Guna memberikan kejelasan dapat dilihat pada gambar 1.1 berkaitan dengan jumlah Kejahatan yang dilaporkan Menurut Polda/ Provinsi tahun 2019.

Gambar 1.1 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan Menurut Polda/ Provinsi Tahun 2019



Sumber: Badan Pusat Statistik tahun 2019.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa isu pemuda merupakan permasalahan serius dan strategis, maka diperlukan upaya melakukan pembangunan kepemudaan sebagai langkah mempersiapkan generasi muda yang terarah. Pemerintah baik pusat maupun daerah sebagai pemantik guna mengarahkan besarnya potensi generasi muda.

Bertolak dari permasalahan tersebut, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang kemudian tertuang pada kerangka umum (*grand design*) terkait prioritas pembangunan pemuda oleh Kemenpora. Dalam kerangka umum tersebut dijelaskan bahwa pembangunan kepemudaan difokuskan pada semua pemuda, baik yang berpotensi maupun yang bermasalah. Selain itu, hal penting lainnya adalah bahwa pembangunan kepemudaan pada masa yang akan

datang, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah (pusat) saja, tetapi juga pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat (Kemenpora, 2009).

Berdasarkan uraian di atas, pemerintah memiliki tiga fungsi yakni fungsi pelayanan, pemberdayaan dan fungsi pembangunan. Konsekuensi logis tersebut mengartikan bahwa bahwa tanggung jawab pembangunan pemuda bukan saja merupakan tugas pemerintah pusat, tetapi juga merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Secara substansi pemerintah daerah mempunyai tugas dalam merealisasikan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya melalui upaya pelayanan kepemudaan. Salah satunya melalui Program Wirausaha Muda Pemula merupakan program yang diperuntukan bagi pengembangan Wirausaha Muda Pemula yang selanjutnya disingkat WMP yang sedang merintis usahanya menuju Wirausaha Muda Pemula yang sedang berkembang.

Berdasarkan hasil observasi peneliti melakukan pengamatan di lapangan, berkaitan dengan permasalahan Program Wirausaha Muda Pemula oleh Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi, sebagai berikut:

1. Dari data penduduk di Kabupaten Bekasi masih terdapat sebesar 11,54 % angka pengangguran terbuka. Salah satu kekuatan pembangunan (*Nation and Character Building*) yang harus memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah adalah bidang kepemudaan. Merujuk pada lokus penelitian, di Kabupaten Bekasi tercatat jumlah penduduk Kabupaten Bekasi tahun 2020 berdasarkan hasil registrasi penduduk dari dukcapil mencapai 3.113.017 jiwa penduduk dengan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 2.444 jiwa per km². Di mana penduduk yang berumur 15 tahun ke atas adalah mereka yang digolongkan sebagai penduduk usia kerja berjumlah 2.856.678 orang. Artinya lebih dari 30 persen rasio penduduk dikategorikan sebagai pemuda. Lebih dari itu, dari penduduk usia kerja tahun 2020, yang termasuk angkatan kerja berjumlah 1.840.666 orang yang terdiri dari 1.628.231 orang bekerja dan 212.435 orang pengangguran terbuka (Bekasi Dalam Angka, 2020). Guna memberikan kejelasan dapat dilihat pada tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3
Kategorisasi Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Kabupaten Bekasi Tahun 2020

Kategori	Jumlah	Bekerja	Tidak Bekerja
Penduduk usia kerja (+15 tahun)	2.856.678		
Usia Angkatan Kerja	1.840.666	1.628.231	212.435

Sumber: BPS Kabupaten Bekasi, 2021.

2. Besarnya rasio pemuda di Kabupaten Bekasi selaras dengan banyaknya pemuda yang tergolong dalam pengangguran terbuka. Hal tersebut berkorelasi dengan besarnya tingkat kriminalitas yang akhir-akhir ini terjadi dan ditenggarai oleh kaum muda. Fakta di atas menunjukkan semakin mengkhawatirkannya kondisi generasi muda khususnya di Kabupaten Bekasi. Berdasarkan hal tersebut diperlukan peran pemerintah yang terartikulasi dari berbagai kebijakan dan program pelayanan kepemudaan. Bahwasannya Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi merupakan *leading sector* yang bertugas merealisasikan pembangunan kepemudaan yang berarti pemerintah daerah idealnya dapat memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
3. Masih minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengkoordinir dan tenaga pelaksana Program Wirausaha Muda Pemula di Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut peneliti sajikan data kepegawaian yang berisi SDM Dinas Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bekasi, sebagai berikut:

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

No	Jenis Pendidikan Formal	Jumlah
1	S-3	2 Orang

2	S-2	24 Orang
3	S-1	50 Orang
4	D-3	7 Orang
5	SLTA	47 Orang
6	SLTP	2 Orang
JUMLAH		135 Orang

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, 2022.

Istilah peran merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang, dalam konteks organisasi, peranan diperoleh dari uraian jabatan, adapun uraian jabatan itu merupakan dokumen tertulis yang memuat persyaratan-persyaratan dan tanggung jawab atas suatu pekerjaan. Oleh karena itu, hakikat peranan sebagai perwujudan interaksi antara orang-orang dalam organisasi. Dengan demikian, banyak yang dapat dilakukan oleh para pemuda untuk merencanakan intervensi ke arah perubahan, perbaikan dan penyempurnaan organisasi (Thoha, 2017:204).

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan pentingnya peran pemerintah daerah sebagai garda terdepan dalam upaya pembangunan kepemudaan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengkaji tema tersebut, dengan judul **“Peran Pemerintah dalam Program Wirausaha Muda Pemula pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan penelitian diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Pemerintah dalam Program Wirausaha Muda Pemula pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi?
2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi dalam Program Wirausaha Muda Pemula pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi?

3. Bagaimana strategi yang dilakukan Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian diatas maka peneliti memiliki tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, menjelaskan, dan mendeskripsikan Peran Pemerintah dalam Program Wirausaha Muda Pemula pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi.
2. Untuk mengetahui, menjelaskan, dan mendeskripsikan hambatan yang dihadapi dalam Program Wirausaha Muda Pemula pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi.
3. Untuk mengetahui, menjelaskan, dan mendeskripsikan strategi yang dilakukan Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi dalam Programi Pemuda Melalui Wirausaha Muda Pemula.

1.4 Signifikansi Penelitian

Berdasarkan penelitian sebelumnya penelitian ini membagi signifikansi menjadi dua hal, yaitu signifikansi akademik dan signifikansi praktis.

1.4.1 Signifikansi Akademik

Berbagai penelitian tentang peran pemerintah dalam pembangunan pemuda telah banyak dilakukan sebelumnya, jumlah kajian pustaka penelitian sebelumnya dijadikan rujukan dalam penelitian ini yaitu enam (6) resume baik yang bersumber dari skripsi maupun tesis. Berdasarkan hal tersebut peneliti belum menemukan penelitian terkait Peran Pemerintah Dalam Program Wirausaha Muda Pemula Pada Dinas Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bekasi. Terdapat beberapa rujukan yang relevan dengan kajian dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Penelitian Mardawia (2017) berjudul Peran Pemerintah Terhadap Pengembangan Kreativitas Pemuda Dalam Meningkatkan Potensi Produk Usaha Lokal Di Kabupaten Kolaka Timur. Penelitian ini bertujuan: (1)

- Mengetahui bagaimana peran pemerintah terhadap pengembangan kreativitas pemuda dalam meningkatkan potensi produk usaha lokal di Kabupaten Kolaka Timur, dan (2) faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas pemuda dalam meningkatkan potensi produk usaha lokal di Kabupaten Kolaka Timur. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan penjabaran secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah di Kabupaten Kolaka Timur dalam mendorong dan pemberdayaan masyarakat telah dilakukan seperti pada dinas koperasi, prindustrian, dan perdagangan melakukan kegiatan pelatihan kewirausahaan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam program perencanaan pembangunan ekonomi yaitu PELD (Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah) yang sementara dibentuk sekarang yaitu Lembaga Ekonomi Masyarakat sebagai wadah dalam mengelola usaha lokal daerah. Faktor yang mempengaruhi peningkatan produk usaha lokal yaitu faktor yang mendukung adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia sedangkan yang menjadi penghambat adalah sarana dan prasana yang belum maksimal dan keterbatasan anggaran sehingga pemberian modal belum merata.
2. Penelitian Putra (2015) dengan judul Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca di Kabupaten Jombang. Pada penelitian ini, peneliti ingin mendeskripsikan bentuk peran pemerintah dan partisipasi pelaku usaha dalam pengembangan UMKM manik-manik kaca di Kabupaten Jombang. peneliti tertarik untuk melihat sejauh mana peran pemerintah selaku aktor pengembangan dan partisipasi pelaku usaha sebagai pihak yang dikembangkan, karena apa yang dilakukan di Kabupaten Jombang merupakan best practice yang dapat direplikasikan ke daerah lain untuk peningkatan pendapatan masyarakat dan pengoptimalan potensi ekonomi daerah. Dari hasil penelitian tentang pengembangan UMKM manik-manik kaca di Kabupaten Jombang, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat beberapa peran pemerintah yaitu sebagai fasilitator dan katalisator. Pemerintah Kabupaten Jombang sebagai fasilitator melalui berbagai kegiatan fasilitasi yang meliputi pelatihan manajemen usaha dan proses produksi, bantuan sarana dan

prasarana berupa pemberian alat penumbuk kaca dan tungku pembakaran. Pemerintah Kabupaten Jombang sebagai katalisator melalui berbagai kegiatan yang meliputi penetapan manic-manik kaca sebagai produk unggulan kabupaten Jombang, promosi produk dengan mengikuti pameran skala nasional dan internasional, bantuan pengurusan HAKI, penyediaan modal bergulir dengan bunga rendah.

3. Penelitian Sidauruk (2013) yang berjudul Peningkatan peran pemerintah daerah Dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan di Jawa Barat dan bertujuan: 1) melihat dan mengklasifikasi dukungan Pemda Provinsi Jawa Barat dalam bentuk kebijakan seperti Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur, serta bentuk kesiapan dan dukungan anggaran yang tertuang dalam APBD-nya, 2) mengidentifikasi dan menganalisis produk ekonomi kreatif bagi daerah Provinsi Jawa Barat terkait pelaksanaan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif, 3) mengidentifikasi dan menganalisis potensi ekonomi kreatif Provinsi Jawa Barat terkait dengan Penyusunan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif, dan 4) mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang dihadapi daerah Provinsi Jawa Barat serta solusinya, terkait dengan pelaksanaan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif. Kesimpulan yang dapat disampaikan dari penelitian ini antara lain: pertama, pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat mendukung pengembangan ekonomi kreatif di wilayahnya. Pemda Provinsi Jawa Barat telah sangat siap melaksanakan amanat Inpres No 6 tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Hal ini dibuktikan dengan adanya kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemda terkait hal tersebut seperti Cetak Biru Rencana Pengembangan Industri Kreatif Jawa Barat, Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 500/Kep.146-Bapp/2012 tentang Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif Jawa Barat, dan adanya Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Jawa Barat. Selain dari sisi kebijakan, kondisi SDM dan kesiapan pendanaan juga sangat mendukung pengembangan ekonomi kreatif di Jawa Barat. Peran serta pemerintah dalam pengembangan ekonomi kreatif tidak bisa disamakan dengan campur tangan pemerintah terhadap kebijakan lainnya.

Peran pemerintah bukan dalam pengembangan kreatifitas tapi menciptakan kondisi bagaimana usaha kreatif dapat terus berjalan dan semakin berkembang. Kedua, kondisi ekonomi kreatif di Jawa Barat telah berkembang turun temurun dan didukung oleh kondisi keunggulan/ potensi kreatif yang berbeda dari provinsi lain. Berdasarkan potensinya yang besar, selain mempunyai 14 subsektor basis industri kreatif yang dicanangkan oleh Kementerian Perdagangan, Jawa Barat menetapkan 1 (satu) subsektor industri kreatif tambahan yaitu kulier.

4. Penelitian Muchtar (2017) dengan judul "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Di Kabupaten Pinrang". Fokus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Di Kabupaten Pinrang dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemberdayaan organisasi kepemudaan di Kabupaten Pinrang. Teknik analisis secara kualitatif yaitu analisis data berdasarkan kata-kata yang disusun dalam bentuk teks yang diperluas. Data yang dianalisis adalah data dari situasi-situasi atau peristiwa yang terjadi di lapangan dan juga didukung dengan bantuan data primer yang berasal dari hasil wawancara, pertanyaan-pertanyaan, tanggapan-tanggapan dari para informan dan studi kepustakaan berdasarkan indikator-indikator yang ditentukan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam pemberdayaan organisasi kepemudaan di Kabupaten Pinrang belum dapat dikatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya program khusus yang dibuat serta pendanaan yang tidak jelas dari pemerintah daerah untuk memberdayakan organisasi kepemudaan yang ada. Ini merupakan tugas pemerintah daerah pada umumnya dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga pada khususnya agar lebih memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan organisasi kepemudaan di Kabupaten Pinrang saat ini. Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan organisasi kepemudaan. Faktor pendukung yakni tingginya minat pemuda dalam berorganisasi serta semangat bekerja Dispaspor dalam memberdayakan organisasi kepemudaan. Sedangkan faktor penghambat yakni Dispaspor baru

terbentuk selama setahun sehingga masih belum berpengalaman dalam menengahi masalah organisasi kepemudaan serta pendataan organisasi kepemudaan yang kurang jelas.

5. Penelitian Rahmat (2017) yang berjudul Peran Pemerintah Kota Medan Dalam Pembangunan Pemuda Di Kota Medan. Permasalahan penelitian ini difokuskan pada tiga aspek, yaitu: kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Medan untuk pembangunan pemuda; program-program Pemerintah Kota Medan dalam aspek pembangunan pemuda; serta sasaran kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam pembangunan pemuda di Kota Medan. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif yang melibatkan beberapa informan kunci didukung dengan data-data lainnya, berupa dokumen serta literatur. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam bidang kepemudaan merupakan leading sektor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan sebagai SKPD yang mengelola bidang kepemudaan dan olahraga. Hasil penelitian juga memperlihatkan kurang maksimalnya peran Pemerintah Kota Medan dalam pembangunan pemuda ditunjukkan dengan minimnya kegiatan-kegiatan pemberdayaan. Kegiatan-kegiatan kepemudaan umumnya didominasi oleh kegiatan-kegiatan olahraga. Berdasarkan kajian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembangunan pemuda oleh Pemerintah Kota Medan merupakan leading sekotornya Dinas Pemuda dan Olahraga yang diarahkan untuk membentuk karakter pemuda Kota Medan agar dapat berpartisipasi mewujudkan visi Kota Medan menjadi kota metropolitan dan religius. Program-program Dispora sebagai leading sektor bidang kepemudaan dan olahraga kelihatannya hanya difokuskan pada bidang olahraga. Program-program lain di bidang kepemudaan dilaksanakan juga oleh SKPD selain Dispora Kota Medan. Selanjutnya penelitian ini menunjukkan bahwa sasaran program pembangunan Pemerintah Kota Medan di bidang kepemudaan dinilai tidak tepat sasaran karena minimnya komunikasi dan keterlibatan kelompok muda dalam penyusunan kebijakan tersebut.

6. Penelitian Gahung et al., (2017) yang berjudul Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pemuda Di Desa Liwutung Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana Peran Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara melalui Dinas Pemuda dan Olahraga dalam memberdayakan Pemuda Desa khususnya di Desa Liwutung sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan. Dari permasalahan yang ada, penelitian ini menggunakan metode atau pendekatan kualitatif untuk mendapatkan hasil yang mendalam dari penelitian ini, dengan beberapa informan kunci yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Bupati selaku pemimpin tertinggi di Kabupaten Minahasa Tenggara telah berhasil membuat keadaan Desa Liwutung yang sebelumnya tidak kondusif menjadi kondusif, namun peran dari Dinas pemuda dan Olahraga sendiri belum maksimal terlihat belum adanya program yang menyentuh pemuda desa, sehingga pemuda desa merasa terabaikan dengan ketidakhadiran pemerintah di Desa. Perlu adanya pembentukan karang taruna yakni organisasi kepemudaan di desa untuk merangkul aspirasi pemuda desa dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan kepemudaan selain kegiatan keagamaan.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini berfokus pada peran pemerintah namun lebih spesifik membahas Program Wirausaha Muda Pemula di Kabupaten Bekasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, teknik perolehan data menggunakan observasi dan wawancara mendalam, secara akademik hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi khususnya dalam kajian ilmu pemerintahan. Khususnya membahas peran pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bekasi sebagai *leading sector* pembangunan pemuda.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Signifikansi praktis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan informasi berkaitan program-program kepemudaan khususnya melalui Program Wirausaha Muda Pemula.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan masukan kepada pemerintah mengenai pelaksanaan program-program kepemudaan khususnya melalui Program Wirausaha Muda Pemula dapat berjalan dengan maksimal.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan informasi dan masukan kepada masyarakat luas khususnya generasi muda agar dapat berpartisipasi melalui program-program pemerintah khususnya melalui Program Wirausaha Muda Pemula yang diimplementasikan pemerintah daerah.

1.5 Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan penulisan laporan penelitian mengenai Peran Pemerintah dalam Program Wirausaha Muda Pemula pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi, maka dari itu penulis membuat sistematika ke dalam lima bab diantaranya:

Bab I: Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini merupakan gambaran umum mengenai dasar penelitian terhadap penelitian yang dilakukan, hal tersebut terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian yang terdiri dari signifikansi akademik dan praktis dan sistematika penulisan. Dalam signifikansi penelitian akademik peneliti menguraikan tentang penelitian terdahulu yang pernah dilakukan.

Bab II: Kerangka Teori

Bab ini berisi mengenai kerangka teori yang menguraikan pembahasan tentang teori yang berkaitan “Peran Pemerintah Dalam Program Wirausaha Muda Pemula”. Peneliti dalam bab ini juga menguraikan kerangka berfikir, dan asumsi penelitian.

Bab III: Metodologi Penelitian

Bab ini menguraikan pembahasan paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, teknik perolehan data, teknis analisis data, *goodness and quality criteria* penelitian, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian dan keterbatasan penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab hasil penelitian terdapat gambaran umum dari objek penelitian, memaparkan hasil penelitian dari rumusan masalah yang ingin diteliti dengan menyimpulkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan, pembahasan yang berisi tentang hasil penelitian yang tidak mendukung dengan teori yang digunakan, membedakan dan menyamakan hasil penelitian dengan peneliti terdahulu dan menjelaskan pentingnya peneliti yang telah diteliti.

Bab V Kesimpulan

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menarik inti dari hasil penelitian tersebut, dan pada ini terdapat rekomendasi penelitian yang berisi saran ataupun rekomendasi dari peneliti untuk peneliti selanjutnya dari saran dari peneliti untuk tempat dari objek penelitian.

Daftar Pustaka

Pada bagian akhir di lampirkan Daftar pustaka berisi daftar buku, jurnal, hasil penelitian berupa skripsi maupun tesis, website, maupun produk hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini.